



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w, Sp. OG yang menyatakan bahwa Ny. Nanik Susilowati masuk Rumah Sakit tanggal 09 Mei 2002 dan keluar Rumah Sakit tanggal 14 Mei 2002 dan pada tindakan perawatan Dr. Hanny Sumampouw, Sp. OG menyatakan: "dila kukan operasi Sectio Caesaria pada tanggal 10 Mei 2002, pembiusan dimulai jam 13.00, operasi dimulai jam 13.10, Bayi I lahir jam 13.18, Bayi II lahir jam 13.20. Operasi selesai jam 14.00 (Lampiran Bukti P-10)"}{\f1\insrsid7209393 .}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 4. \tab} Dan dipertegas dengan Surat Keterangan dari pihak Rumah Sakit Katolik St}{\f1\insrsid7209393 .}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Vincentius A Paulo yang ditandatangani bagian Tata Usaha yaitu Ibu Lucia B yang menyatakan bahwa Ny. Nanik Susilowati benar-benar menderita sakit di Rumah Sakit tersebut sejak 09 Mei 2002 dan pulang tanggal 14 Mei 2002 (Lampiran Bukti P-11).

\par }}\pard \qj \fi-360\li360\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin360\itap0 \pararsid2623586 {\f1\insrsid2623586 3. }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \v93

Menimbang bahwa selanjutnya mempertimbangkan bukti surat P1 dan P2-2 dan P-I dan P2-5 masing-masing tanggal 9 Agustus 2004 dan 27 April 2005".

\par }}\pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0 \pararsid6893769 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 "Bahwa setelah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim terhadap kedua bukti surat tersebut, M

ajelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1. \tab} }}\pard \qj \fi-274\li720\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx720\faauto\sls16\ilv1\ri0\lin720 \itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Surat keterangan yang menyatakan Penggugat I Nanik Susilowati menderita sakit sejak tanggal 9 Mei 2002 sampai dengan tanggal 14 Mei 2002 baru dibuat pada tanggal 9 Agustus 2004 jadi 2 tahun 3 bulan kemudian sur

at keterangan tersebut dibuat, begitu pula surat keterangan pada tanggal 27 April 2005 baru dibuat 3 tahun ;

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 2. \tab} Bahwa kedua bukti surat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bukan sebagai alat bukti dengan alasan hanya merupakan keterangan seharusnya mereka yang

memberikan pernyataan memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan".}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

\par }}\pard \qj \li446\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\faauto\rin0\lin446\itap0 \pararsid6893769 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Bahwa menurut pendapat para

Pemohon Kasasi}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 , }{\f1\insrsid6893769 \charrsid7691830

Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah }}{\f1\insrsid6893769 \charrsid10226410 melanggar hukum sebab :}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1. \tab} }}\pard \qj \fi-334\li720\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx720\faauto\sls16\ilv2\ri0\lin720 \itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyatakan : Maka yang disebut bukti adalah bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah.

\par }}\pard \qj \li446\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\faauto\rin0\lin446\itap0 \pararsid6893769 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Bahwa menurut pendapat para

Pemohon Kasasi}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 , }{\f1\insrsid6893769 \charrsid7691830

Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah }}{\f1\insrsid6893769 \charrsid10226410 melanggar hukum sebab :}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1. \tab} }}\pard \qj \fi-334\li720\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx720\faauto\sls16\ilv2\ri0\lin720 \itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyatakan : Maka yang disebut bukti adalah bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah.

\par }}\pard \qj \li446\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\faauto\rin0\lin446\itap0 \pararsid6893769 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Bahwa menurut pendapat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 1866 BW menyatakan alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan aksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Surat Keterangan Medik yang dibuat oleh Dr. Hanni Sumampouw, SpOG dan Surat Keterangan dari RSK St Vincentius A Paulo hanya sebagai keterangan adalah salah dan melanggar hukum

sebab Surat Keterangan dari RSK St Vincentius A Paulo dan Surat Keterangan Medik yang dikeluarkan oleh Dr. Hanni Sumampouw, SpOG adalah medical record dari penderita (Ny.Nanik Susilowati) dalam hal ini adalah Penggugat I/Tergugat Rekononensi dan merupakan akta otentik. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa pertimbangan majelis Hakim melanggar hukum.

Surat Keterangan Medik dan Surat Keterangan dari RSK St Vincentius A Paulo dan Surat Keterangan Medik yang dikeluarkan oleh Dr. Hanni Sumampouw, SpOG dari Dr.Hani Sumampouw, SpOG dan surat keterangan yang keabsahannya dan kebenarannya telah terbukti dengan sendirinya yang didukung dengan kartu keluarga maupun akta kelahiran. Semua surat tersebut adalah akta otentik yang merupakan hasil dari pegawai umum.

4. "Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-2, TI-1 dan TII-1 dan TII-8 adalah surat bukti tentang jual beli bangunan (rumah) dan Peminjaman Hak Sewa Tanah Persewaan Kota Surabaya" (Lampiran bukti P-6 halaman 39).

Bukti surat yang digunakan Tergugat I (TI-2) atau Penggugat Rekononensi (Lampiran bukti P-6 halaman 30). Tergugat II Kompensi (TII-1) (Lampiran bukti P-6 halaman 32), dan Turut Tergugat II (TTI-8) (Lampiran bukti P-6 halaman 33), adalah bukti Akta Jual Beli Bangunan Rumah dan Peminjaman Hak Sewa Tanah Persewaan Kota Surabaya No.54 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Shinta Ameliawati, SH. Bukti ini adalah bukti yang menyatakan tentang jual beli rumah tersebut. Pembahasan lebih detail dan terperinci akan dibahas oleh Para Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keberatan ke 5.

\par }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum sebab }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 bukti TI-6 dan TII-3. TI-6

adalah bukti nomor 6 dalam daftar bukti Tergugat I Kompensi/ Peggugat Rekonpensi yaitu foto copy 1 set kuitansi terdiri dari 3 lembar kuitansi (Lampiran bukti P-6 halaman 31) yang bila dicermati dengan seksama dan teliti didapatkan ke}{\f1\insrsid6184760 j}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 anggalan pada bukti yang diajukan oleh Tergugat I ya}{\f1\insrsid6184760 i}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 tu :

\par Pada bukti TI 6 ad 1 didapatkan kuitansi tentang Pembayaran harga jual beli bangunan disertai pemindahan hak sewa atau persil di Jalan Barata Jaya V/12 Surabaya ke atas nama Djohan Hijanto tertanggal 10 April 2002 se

nilai Rp.315.000.000,- bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Tergugat II (TII-3) adalah bukti nomor 3 dalam daftar bukti Tergugat II. Sedangkan pada bukti TI}{\f1\insrsid6184760 }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

6 ad 3 didapatkan bukti pembayaran "uang muka}{\f1\insrsid6184760 \94}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 bangunan di Jalan Barata Jaya V/12 Surabaya a seharga Rp.300.000.000,- juga sebesar Rp.275.000,- akan dibayar bilamana kelengkapan-kelengkapan serta persyaratan-persyaratan telah terpenuhi tertanggal 5 April 2002 terbilang Rp.25.000.000,- (Lampiran bukti P-6 halaman 31) pada bukti tersebut juga dit

a ndatangani oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH. Bahan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dengan obyek yang sama didapatkan perbedaan keterangan tentang harga jual rumah dan kedua bukti tersebut diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Untuk kedua bukti tersebut di atas yaitu bukti TI-6 ad 1 yang isinya sama dengan bukti TII-3 dan bukti TI-6 ad 3 para Peggugat tidak pernah menandatangani. Apakah mungkin obyek yang sama diketahui oleh orang yang sa}{\f1\insrsid6184760 m}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 a pula yaitu Tergugat I Kompensi/Peggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi didapatkan harga yang berbeda? Hal ini jelas menunjukkan adanya kepalsuan dari bukti tersebut.

\par }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 a pula yaitu Tergugat I Kompensi/Peggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi didapatkan harga yang berbeda? Hal ini jelas menunjukkan adanya kepalsuan dari bukti tersebut.

\par }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 5. }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

"Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Jual Beli No.54 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Shinta Ameliawati, S H adalah akta autentik karenanya mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya akan ketidak benaran akta tersebut}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 ".

\par }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Menimbang bahwa bukti surat tertanda TI}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 -1, }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 TII-2 adalah akta Nomor }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 55 }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 tentang pengosongan rumah tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH yang merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Notaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Par Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 , } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum sebab berdasar } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pasal 165 HIR } {f1\insrsid6184760 m} {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 menyatakan Akta Otentik } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akte tersebut.

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Berdasarkan sifat akta otentik maka sifat akta otentik harus mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah/ mengikat, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil.

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 a.\tab}}\pard \qj \fi-425\li851\ri0\sl360\slmult1\nowidct\par\tx851\faauto\ls17\ilv1\rin0\lin851\itap0\pararsid539588 {f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Berdasarkan sifat akta tersebut di atas maka Akta Notaris Shinta Ameliawati Nomor 54 dan Nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 yg dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH. tidak memiliki kekuatan pembuktian formil sebab : } {f1\ul\insrsid6893769\charrsid7691830

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \loch\af3\dbch\af0\hich\af3 \b7\tab}}\pard \qj \fi-425\li1276\ri0\sl360\slmult1\nowidct\par\tx851\faauto\ls17\ilv12\rin0\lin1276\itap0\pararsid539588 {f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Akta Notaris Shinta Ameliawati, SH. No.54 tentang jual beli dan pemindahan hak atas sewa tanah persewaan Kota Surabaya dan Akta nomor 55 tentang Pengosongan Rumah tanggal 10 Mei 2002 } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 isiny menyatakan : } {f1\insrsid6184760\charrsid6184760

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \loch\af3\dbch\af0\hich\af3 \b7\tab}} {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada awal akta nomor 54 termuat sebagai berikut

"Pada hari ini, hari Jumat tanggal sepuluh

h mei dua ribu dua (10 Mei 2002) menghadap kepada saya, Shinta Ameliawati, Sarjana Hukum dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : Ny Nanik Susilowati, Firmansyah Wibowo pihak Kesatu } {f1\insrsid16655565 - } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Penjual Djohan Hijanto Pihak kedua Pembeli ; } {f1\insrsid6184760

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \loch\af3\dbch\af0\hich\af3 \b7\tab}} {f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Pada akhir akta nomor 54 termuat sebagai berikut : "dibuat dan diresmikan pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh Doktoranda Farida Srihandayani dan Tintrim Handajani Sarjana Hukum, ke duanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi" } {f1\insrsid6184760

par } {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \loch\af3\dbch\af0\hich\af3 \b7\tab}} {f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada awal akta nomor 55 termuat sebagai berikut "Pada hari ini, hari Jumat tanggal sepuluh mei dua } {f1\insrsid6184760 } {

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 ribu dua (10-05-2002) menghadap kepada saya, Shinta Ameliawati, Sarjana Hukum

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : Ny Nanik Susilowati, Firmansyah Wibowo pihak Kesatu; Djohan Hijanto Pihak kedua ;

\par {\listtext\pard\plain\fi-360\li1276\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls17\ilv1\rin0\lin1276\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada akhir akta nomor 55 termuat sebagai berikut : "dibuat da

n diresmikan pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh Doktoranda Farida Srihandayani dan Tintrim Handajani Sarjana Hukum, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi"

\par {\listtext\pard\plain\fi-360\li1276\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls17\ilv1\rin0\lin1276\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada tanggal 10 Mei 2002

Ny.Nanik Susilowati tidak pernah menghadap apalagi menandatangani akta Nomor 54 dan Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati. Sebab pada tanggal 10 Mei 2002 Ny Nanik Susilowati dalam hal ini Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi sedang dalam proses melahirkan secara sectio saecaria. Hal ini dapat dibuktikan dari :

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Kartu keluarga Ny.Nanik Susilowati (Lampiran Bukti P-7),

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \tab}Akta kelahiran kedua anak kembar tersebut (Lampiran Bukti P-8 dan P-9),

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \tab}Juga diperkuat oleh Surat Keterangan Medik yang dibuat oleh Dr.Hanny Sumampouw, Sp.OG yang menyatakan bahwa Ny Nanik Susilowati }{\f1\insrsid6184760 m}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 asuk Rumah Sakit tanggal 09 Mei 2002 dan keluar Rumah Sakit tanggal 14 Mei 2002 dan pada tindakan perawatan Dr.Hanny Sumampouw, Sp.OG menyatakan : "dilakukan operasi Sectio Caesaria pada tanggal 10 Mei 2002, pembiusan dimulai jam 13.00, operasi dimulai jam 13.10, Bayi I lahir jam 13.18, Bayi II lahir jam 13.20. Operasi selesai jam 14.00 (Lampiran Bukti P-10),

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \tab}Dan dipertegas dengan Surat Keterangan dari pihak Rumah Sakit Katolik S t.Vincentius A Paulo yang ditandatangani bagian Tata Usaha yaitu Ibu Lucia B yang menyatakan bahwa Ny. Nanik Susilowati benar-benar menderita sakit di Rumah Sakit tersebut sejak 09 Mei 2002 dan pulang tanggal 14 Mei 2002 (Lampiran Bukti P-11).

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \tab}Jawaban Tergugat II (Notaris Shinta Ameliawati) sendiri tertanggal 25 Nopember 2004 yang menyatakan penanda }{\f1\insrsid16655565 -}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 tangan }{\f1\insrsid16655565 an }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 akta nomor 54 dan nomor 55 dilakukan tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad c dan ad.d).

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Keempat bukti tersebut di atas (Lampiran buk

\par {\listtext\pard\plain\fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx851\fauto\ls15\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Keempat bukti tersebut di atas

(Lampiran buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti P-8, 9, 10, 11) dan keterangan Notaris Shinta Ameliawati, SH (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad c dan ad.d) sangat membuktikan Akta nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat Notaris Shinta Ameliawati tidak memiliki kekuatan pembuktian formil sebab pada tanggal 10 Mei 2002 tidak ter}{\f1\insrsid6184760 j}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 adi peristiwa jual beli seperti yang terdapat dalam akta nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 tetapi yang terjadi adalah Penggugat I/Tergugat Reko}{\f1\insrsid6184760 p}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 ensi sedang mengalami proses operasi sectio saecaria (Lampiran bukti P-10) dan melahirkan bayi kembar (Lampiran bukti P-7, 8, 9, 10).
\par Akta Nomor 54 dan Nomor 55 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil : Hal ini dapat dibuktikan dengan :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 a. \tab}}\pard \qj \fi-360\li1080\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\jclisttab\tx1080\faauto\sls18\rin0 \lin1080\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Karena kekuatan pembuktian formal jelas terbukti bahwa tidak pernah terjadi suatu peristiwa seperti yang

termuat dalam akta nomor 54 maka jelas tersurat bahwa semua yang tercantum pada akta nomor 54 dan nomor 55 adalah palsu. Hal ini dapat dibuktikan karena Penggugat I sedang menjalani operasi sectio saecaria jelas bahwa semua peristiwa yang termuat dalam akta nomor 54 dan nomor 55 adalah fiktif/palsu".}{\f1\insrsid6184760

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 b. \tab}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Saksi-saksi yang ada serta keterangan yang menyatakan setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut maka segera para penghadap saksi-saksi tersebut dan saya notaris menandatangani

akta ini, karena tidak terjadi peristiwa seperti yang tertuang dalam akta pada tanggal 10 Mei 2002 maka saksi-saksi dan keterangan bahwa akta nomor 54 dan nomor 55 ditandatangani seperti yang termuat dalam isi akta adalah palsu. }{\f1\insrsid6184760

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 c. \tab}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada materi akta nomor 54

dinyatakan bahwa terjadi jual beli bangunan RSS dengan harga jual Rp.70.000.000,- dan pada materi akta nomor 55 dinyatakan bahwa }{\b\af1\insrsid6893769\charrsid7691830 : }{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Tergugat I akan memberi ganti kerugian untuk mengosongkan rumah Rp.245.000.000,- Bukti TI-2 dan TI-1 serta diperkuat dengan b

ukti notaris TII-1 dan TII-2, bila dilihat bahwa bukti Tergugat II 3 adalah kuitansi harga pembayaran jual beli bangunan Rp.315.000.000,- maka terdapat kepalsuan antara bukti akta nomor 54, nomor 55 dan bukti fotokopi kuitansi pembayaran.}{\f1\insrsid6184760

\f1\insrsid6184760

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 d. \tab}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Pada kesaksian Not

aris Shinta Ameliawati dibawah sumpah (Lampiran bukti P12 halaman 9-10) Notaris Shinta Ameliawati dengan tegas menyatakan bahwa akta tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2002 tetapi pada jawaban Notaris Shinta Ameliawati pada gugatan perdata Notaris

s
Shinta Ameliawati menyatakan akta Nomor 54 dan Nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 7 ad c dan ad.d). Jelas terlihat bahwa terdapat kepalsuan cerita yang diucapkan Notaris Shinta Ameliawati di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan.}

\par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\vf1 e.
\tab}}{\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830

Pada kesaksian Notaris Shinta Ameliawati dibawah sumpah (Lampiran bukti P12 halaman 9-10) Notaris Shinta Ameliawati dengan tegas menyatakan bahwa Notaris Shinta Ameliawati telah mengenal Penggugat II selama 20 tahun, berdasarkan pengakuan tersebut tidak mungkin bila seseorang telah mengenal selama 20 tahun tidak mengetahui rumah Penggugat II selain itu fakta yang ada bahwa lokasi rumah Penggugat Kompensi terletak di tengah kota dan berada di kawasan elite jadi secara logika tidak mungkin

ada rumah sangat sederhana di tempat tersebut tetapi pada isi akta Nomor 54 jelas tersurat bahwa rumah Para Penggugat disebutkan sebagai Rumah Sangat Sederhana (RSS) padahal rumah Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah rumah mewah. Apakah boleh seorang notaris mengkonstatir kenyataan dengan menyatakan rumah mewah sebagai rumah RSS?.

\par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\vf1 f.
\tab}}{\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830

Pada bukti TII-3 yang disampaikan Tergugat II dalam Kompensi maupun Tergugat I dalam Kompensi jelas menunjukkan bahwa baik Notaris Shinta Ameliawati maupun Djohan Hijanto sama-sam

a mengetahui jual beli seharga Rp.315.000.000,- tetapi pada kenyataannya dalam akta Nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 yang diajukan bukti oleh Tergugat I (TI-I), Tergugat II (TII-I) dan turut Tergugat II-8 didapatkan pernyataan secara tersurat bahwa rumah para Penggugat dinilai sebagai rumah RSS seharga Rp.} {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 70.000.000,- Menurut Prof.GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris halaman } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 61 } { \vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 apabila para pihak memberitahukan kepada notaris harga jual beli antara kedua belah pihak akan

tetapi meminta notaris untuk mencantumkan harga lebih rendah maka notaris tersebut melakukan kesalahan berupa "intelectuele valsheid in geschrifte "yang dimaksud dalam Pasal } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 263 } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 dan } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 264 } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 KUHP.} {\i\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 Apalagi dalam kasus ini para Penggugat Kompensi tidak pernah tah

u akta jual beli Nomor 54 yang secara yuridis dibuat pada tanggal 10 Mei 2002 tetapi menurut Notaris Shinta Ameliawati sendiri yang membuat akta tersebut menyatakan bahwa akta tersebut ditanda tangani pada tanggal 10 April 2002. Sampai saat ini para pihak belum pernah menerima turunan akta nomor 54 dari notaris Shinta Ameliawati.}

\par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\vf1 g.
\tab}}{\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830

Dalam jawabannya Tergugat II (Notaris Shinta Ameliawati) menyatakan Notaris Shinta Ameliawati menyatakan akta-akta nomor 54 dan nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad.c dan ad.d) bila}{

\vf1\insrsid6184760 } {\vf1\insrsid6893769\charrsid7691830 kita teliti lebih dalam pada bukti Tergugat I (TI-1), Tergugat II (TII-1) dan Turut Tergugat II-8 terdapat kalimat "tanah hak sewa yang dikelola oleh kotamadya Surabaya, sebagaimana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam surat ijin Pemakaian Tanah Jangka Me}}{\f1\insrsid6184760 ne}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

ngah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Nomor 185.45/1643P/402.4.22/ 2002 tertanggal 3 Mei 2002 seluas 162 m2 tertulis atas nama Ny. Nanik Susilowati" dengan

jelal tersurat bahwa surat ijin pemakaian tanah atas nama Ny.Nanik Susilowati baru keluar tanggal 3 Mei 2002 tetapi dalam jawabannya Notaris Shinta Ameliawati menyatakan tanda tangan dilakukan setelah diadakan pembacaan akta tersebut oleh Notarisnya sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas didapatkan bahwa akta }}{\f1\insrsid6184760 }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 nomor 54 dan n}}{\f1\insrsid6184760 omor 55 yang ditanda tangani pad}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

a tanggal 10 April 2002 adalah akta yang palsu dan jawaban Notaris Shinta Ameliawati pada tanggal 5 Nopember 2004 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 a

d.c dan ad.d) adalah palsu/tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebab pada tanggal 10 April 2002 akta tersebut belum ditulis isinya sebab masih menunggu surat ijin pemakaian tanah dari kotamadya yang baru keluar tanggal 3 Mei 2002. }}{\f1\insrsid6184760

\par }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 h.

\tab}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Karena Akta Nomor 54 dan nomor 55 dibuat pada tahun 2002 maka peraturan jabatan notaris adalah reglement op }}{\f1\insrsid6184760 h}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 et notaris (Ord.van 11 Jan 1860).

Maka berdasarkan Pasal 28 PJN ayat 1 yang berbunyi }}{\i\af1\insrsid6893769\charrsid6184760

wanner een of meer der verschijnende partijen de taal waarin de akte is verleden Diet verstaan, zal huneene vertolking der akte door de notaris en indien deze daartoe Diet in staat is door eene folk, worden voorgehouden}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 . Yang Artinya penandatanganan dari sesuatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari yang berlainan. Di dalam Pasa

l 28 PJN dinyatakan secara tegas bahwa segera setelah dibacakan akta tersebut harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap dalam arti pembacaan dari akta tersebut dilakukan sekali. }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Menurut Prof. GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris halaman 206}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 -}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 209 maka jelas tersurat bahwa akta nomor }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

54 }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 tanggal 10 Mei 2002 yang menurut Notaris Shinta Ameliawati telah ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 jelas kehilangan kekuatan otentiknya/akta itu tidak menjadi akta otentik. }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

\par }}\pard \qj \li720\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0\pararsid6893769}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Apakah akta otentik yang telah kehilangan sifat otentiknya bisa disebut otentik ?.

\par }}\pard \qj \fi-426\li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\tx426\faauto\rin0\lin426\itap0\pararsid6893769}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 6. }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi}}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 , }}{\f1\insrsid6893769\charrsid7691830 Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sannya adalah telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan obyek se} {\f1
\\insrsid6184760 n} {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830
gketa dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi. Pada bukti TI-1 TII-1 obyek sengketa di dalamnya seperti yang
terantum pada akta nomor 54 dan dan nomor } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 55 } {\f1
\\insrsid6893769\\charrsid7691830 tanggal 10 Mei 2002 adalah rumah sangat sederhana,
padahal obyek sengketa tersebut berada di ko} {\f1\\insrsid6184760 t} {\f1\\insrsid6893769
\\charrsid7691830 a besar dengan bangunan berlantai } {\f1
\\insrsid6893769\\charrsid7691830 2 } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 (dua) yang
berada di lingkungan elite sehingga sangat tidak mungkin para Penggugat menjualny
a pada Tergugat dengan harga Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan
nilai obyek sengketa tersebut apabila dijual sesuai harga pasar sa} {\f1\\insrsid6184760 at} {\f1
\\insrsid6893769\\charrsid7691830
itu sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian terbukti dengan jelas
bahwa antara Tergugat dan Tergugat II bekerja sama untuk memasukkan keterangan yang
tidak benar} {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 / } {\f1
\\insrsid6893769\\charrsid7691830 palsu dalam akta tersebut (lampiran bukti P-13).
\\par {\\listtext\\pard\\plain\\f1\\insrsid6893769\\charrsid6184760 \\hich\\af1\\dbch\\af0\\loch\\f1 7.
\\tab } }\\pard \\qj \\fi-426\\li426\\ri0\\sl360\\slmult1\\nowidct\\par\\fauto\\ls19\\rin0\\lin426\\itap0
\\pararsid539588 {\\f1\\insrsid6893769\\charrsid6184760
"Bahwa surat ijin pemakaian tanah No.188.45/6113 P/ 402.4.4.22/2202 tanggal 03 Mei 2002
yang dicap dan ditandatangani oleh M.Sujud Riyadi, SH.MM., Kepala dinas Tata Kota dan
rumah diberikan atas nama Ny Nanik Susilowati (Penggugat I)} {\f1
\\insrsid6893769\\charrsid6184760 " } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid6184760
\\par } \\pard \\qj \\li426\\ri0\\sl360\\slmult1\\nowidct\\par\\fauto\\rin0\\lin426\\itap0\\pararsid6893769
{\\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830
"Bahwa selanjutnya surat ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat I dialihkan kepada
Djohan Hijanto berdasarkan akta Jual Beli Bangunan dari Notaris Shinta Ameliawati, SH
Nomor } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 54 } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830
tanggal 10 Mei 2002 antara Nanik dan Djohan Hijanto"
\\par } {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas tampak jelas bahwa pengalihan/hak atas sewa tanah berdasarkan akta Jual Beli
Bangunan dari Notaris Shinta Amel
iawati, SH Nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 maka berdasarkan uraian terperinci yang
berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas yang menyatakan bahwa akta nomor 54 d} {\f1
\\insrsid6184760 a} {\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830
n nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat Notaris Shinta Ameliawati kehilangan
otentisitasnya maka dengan ini para Pemohon Kasasai mohon agar Majelis Hakim
Mahkamah Agung membatalkan hak atas surat ijin pemakaian tanah atas nama Djohan
Hijanto.
\\par {\\listtext\\pard\\plain\\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830 \\hich\\af1\\dbch\\af0\\loch\\f1 8.
\\tab } }\\pard \\qj \\fi-360\\li360\\ri0\\sl360\\slmult1\\nowidct\\par\\fauto\\ls19\\rin0\\lin360\\itap0
\\pararsid539588 {\\f1\\insrsid6893769\\charrsid7691830
Menimbang adanya akta nomor 111 tanggal 20 April tentang perjanjian yang berhubungan
dengan akta nomor 55
tanggal 10 Mei 2002, para Pemohon Kasasi jelas terlihat bahwa akta nomor III pertimbangan
hukumnya mengacu pada akta nomor 54 dan nomor 55 yang dibuat Notaris Shinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameliawati bila suatu pertimbangan hukum mengacu pada pertimbangan hukum yang hilang

ntisitasnya maka akta nomor 111 secara otomatis juga hilang kekuatan otentiknya selain itu pada penandatanganan akta nomor 111 Penggugat I (Ny Nanik Susilowati) dipaksa, diancam dan ditekan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pe} {\f1\insrsid6184760 m} { \f1\insrsid6893769\charrsid7691830 yataan secara tertulis yang dibuat oleh Ny.Susana Susilowati, Dr Fransiscus Nanga Roka dan Ny Emmi Susilowati (Lampiran bukti P14, P-15, P-16).

\par } \pard \qj \li360\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin360\itap0\pararsid6184760 {\f1\insrsid6893769\charrsid7691830

Berdasarkan keterangan Tergugat II bahwa adanya akta yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 sebenarnya secara tidak langsung memperkuat dugaan bahwa hubungan } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

yang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat I adalah hutang piutang secara tidak langsung t} {\f1\insrsid6184760 e} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

lah terpenuhi sebab bila akta yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 adalah jual beli mengapa Penggugat pada tanggal 13 Me

i 2002 dan 11 Juni 2002 mentransfer uang sebesar 3% dari jumlah Rp.315.000.000,- walaupun secara eksplisit tidak dapat terungkap tapi secara implisit dapat terbukti (Lampiran Bukti P-21, P-22).

\par } \pard \qj \fi1\li0\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0

\pararsid14363326 {\b\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 DALAM REKONPENSI} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 :

\par } \pard \qj \fi-415\li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 1. "Menimbang, bahwa alat bukti sura} {\f1\insrsid6184760 t} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 b

erupa Akta Jual Beli No.54 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Shinta Ameliawati, SH adalah akta autentik karenanya mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya akan ketidakbenaran akta tersebut ut ".

\par } \pard \qj \fi720\li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Menimbang bahwa bukti sura} {\f1\insrsid8925667 t} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

tertanda TI-1, TII-2 adalah akta Nomor 55 tentang pengosongan rumah tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH yang merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Notaris.

\par "Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum seperti dipertimbang} {\f1\insrsid8925667 -} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

kan tersebut di atas, pihak para Penggugat Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi mohon agar akta notaris tersebut dibatalkan menurut Majelis Hakim akta notaris tersebut tidak dapat dibatalkan dengan alasan para Penggugat

dalam Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan adanya unsur paksaan kekhilafan/penipuan pada saat perjanjian jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris ".

\par } \pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi, Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat

Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum sebab berdasar Pasal 165 HIR menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berku

a

sa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pem beritahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akte tersebut.

\par Berdasarkan sifat akta otentik maka sifat akta otentik harus mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah/ mengikat, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil.

\par {\listtext\pard\plain\fi\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af1\dbch\af0\loch\af1 a. \tab}}\pard \qj \fi-295\li720\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\jclisttab\tx142\faauto\ls20\rin0 \lin720\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Berdasarkan sifat akta tersebut di atas maka Akta Notaris Shinta Ameliawati, SH. Nomor 54 dan Nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 yg dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH.}{\f1\ul \insrsid14363326\charrsid13073001

\par }\pard \qj \li851\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin851\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 TIDAK MEMILIKI

KEKUATAN PEMBUKTIAN FORMIL sebab :

\par {\listtext\pard\plain\fi\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af3\dbch\af0\loch\af3 \b7\tab}}\pard \qj \fi-425\li1276\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\jclisttab\tx0\faauto\ls20\ilv1 \rin0\lin1276\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Akta Notaris Shinta Ameliawati No.54 tentang JUAL BELI DAN PEMINDAHAN HAK ATAS SEWA TANAH PERSEWAAN KOTA SURABAYA dan Akta nomor 55 tentang Pengosongan Rumah tanggal 10 Mei 2002 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 isinya menyatakan :}{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

\par {\listtext\pard\plain\fi\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af10\dbch\af0\loch\af10 \V76\tab}}\pard \qj \fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\ls21\ilv13\rin0\lin1701 \itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Pada awal akta nomor 54 termuat sebagai berikut "Pada hari ini, hari Jumat tanggal sepuluh }{\f1\insrsid8925667 M}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

ei dua ribu dua (10-05-2002) menghadap kepada saya, Shinta Ameliawati, Sarjana Hukum dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenaI dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : Ny Nanik Susilowati, Fir}{\f1\insrsid8925667 m}{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 ansyah Wibowo pihak Kesatu \endash Penjual ; Djohan Hijanto Pihak kedua Pembeli ;

\par {\listtext\pard\plain\fi\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af10\dbch\af0\loch\af10 \V76\tab}Pada akhir akta nomor 54 termuat sebagai berikut : "dibuat dan diresmikan pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh Doktoranda Fari

da Srihandayani dan Tintrim Handajani Sarjana Hukum, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi"

\par {\listtext\pard\plain\fi\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af10\dbch\af0\loch\af10 \V76\tab}Pada awal akta nomor 55 termuat sebagai berikut : "Pada hari ini, hari Jumat tanggal sepuluh }{\f1\insrsid8925667 M}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

ei dua ribu dua (10-05 -2002) menghadap kepada saya, Shinta Ameliawati, Sarjana Hukum dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenaI dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : Ny Nanik Susilowati, Fir}{\f1\insrsid8925667 m}{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 ansyah Wibowo pihak Kesatu; Djohan Hijanto Pihak kedua ;

\par {\listtext\pard\plain\f10\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af10\dbch\af0\hich\af10\76\stab}Pada

akhir akta nomor 55 termuat sebagai berikut : "dibuat dan diresmikan pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dengan dihadiri oleh Doktoranda Farida Srihandayani dan Tintrim Handajani Sarjana Hukum, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi"

\par {\listtext\pard\plain\f3\insrsid14363326\charrsid13073001 \loch\af3\dbch\af0\hich\af3\7\stab}}\pard \qj \fi-425\li1276\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\jclisttab\tx142\faauto\ls20\ilv1\rin0\lin1276\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Pada tanggal 10 Mei 2002 Ny. Nanik Susilowati tidak pernah menghadap apalagi menandatangani akta Nomor 54 dan Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati. Sebab pada tanggal 10 Mei 2002 Ny.Nanik Susilowati dalam hal ini Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi sedang dalam proses melahirkan secara sectio saecaria. Hal ini dapat dibuktikan dari :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 A.\stab}}\pard \qj \fi-425\li1701\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\faauto\ls20\ilv12\rin0\lin1701\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Kartu keluarga Ny.Nanik Susilowati yang merupakan akta otentik (Lampiran Bukti P-7).

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 B.\stab}Akta kelahiran kedua anak kembar tersebut yang merupakan akta otentik (Lampiran Bukti P-8 dan P-9).

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 C.\stab}

Juga diperkuat oleh Surat Keterangan Medik yang dibuat oleh Dr. Hanny Sumampouw, Sp.OG yang merupakan akta otentik yang menyatakan bahwa Ny.Nanik Susilowati masuk Rumah Sakit tanggal 09 Mei 2002

dan keluar Rumah Sakit tanggal 14 Mei 2002 dan pada tindakan perawatan Dr. Hanny Sumampouw, Sp.OG menyatakan : "dilakukan operasi Sectio Caesaria pada tanggal 10 Mei 2002, pembiusan dimulai jam 13.00, operasi dimulai jam 13.10, Bayi I lahir jam 13.18, Bayi II lahir jam 13.20. Operasi selesai jam 14.00 (Lampiran Bukti P-10).

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 D.\stab}

Dan dipertegas dengan Surat Keterangan dari pihak Rumah Sakit Katolik St.Vincentius A Paulo yang ditandatangani bagian Tata Usaha yang merupakan akta otentik yaitu Ibu Lucia B yang meny

atakan bahwa Ny.Nanik Susilowati benar-benar menderita sakit di Rumah Sakit tersebut sejak 09 Mei 2002 dan pulang tanggal 14 Mei 2002 (Lampiran Bukti P-11).}{\f1\ul

\insrsid14363326\charrsid13073001

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 E.\stab}}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Jawaban Tergugat II (Notaris Shinta Ameliawati) sendiri tertanggal 25 Nopember 2004 yang menyatakan penanda}{

\f1\insrsid8925667 -}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tangan akta nomor 54 dan Nomor 55 dilakukan tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad.c dan ad.d).}{\f1\ul\insrsid14363326\charrsid13073001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par \pard \qj \li993\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\faauto\rin0\lin993\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Keempat bukti tersebut di atas (Lampiran bukti P-7, 8, 9, 10, 11) dan jawaban Notaris Shinta Ameliawati, SH (Lampiran Bukti P-6 hala

man 17 ad.c dan ad.d) sangat membuktikan Akta nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat Notaris Shinta Ameliawati, SH, tidak memiliki kekuatan pembuktian formil sebab pada tanggal 10 Mei 2002 tidak terjadi peristiwa jual beli seperti yang terdapat dalam akta Nomor 54 tanggal 10 Mei 2002 tetapi yang terjadi adalah Penggugat I/Tergugat Rekonpensi sedang operasi sectio saecaria (Lampiran bukti P-10 dan melahirkan bayi kembar (Lampiran bukti P-7, 8, 9, 10).

\par AKTA NOMOR 54 dan NOMOR 55 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN

PEMBUKTIAN MATERIIL : Hal ini dapat dibuktikan dengan :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 a. \tab}}\pard \qj \fi-435\li1428\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\jclisttab\tx1428\faauto\ls22\rin0\lin1428\itap0\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Karena kekuatan pembuktian formal jelas terbukti bahwa tidak pernah terjadi suatu peristiwa seperti yang termuat dalam akta nomor 54 maka jelas tersurat bahwa semua yang tercantum pada akta nomor 54 dan

nomor 55 adalah palsu. Hal ini dapat dibuktikan karena Penggugat I sedang menjalani operasi sectio saecaria jelas bahwa semua peristiwa yang termuat dalam akta nomor 54 dan nomor 55 adalah fiktif/palsu.

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 b. \tab}

Saksi-saksi yang ada serta keterangan yang menyatakan setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut maka segera para penghadap saksi-saksi tersebut dan saya notaris menandatangani akta ini, karena tidak terjadi peristiwa seperti yang tertuang dalam akta pada tanggal 10 Mei 2002 maka saksi-saksi dan keterangan bahwa akta nomor 54 dan nomor 55 ditandatangani seperti yang termuat dalam isi akta adalah palsu.

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 c. \tab}

Pada materi akta nomor 54 dinyatakan bahwa terjadi jual beli bangunan RSS dengan harga jual Rp.70.000.000,- dan pada materi akta nomor 55 dinyatakan bahwa Tergugat I akan memberi ganti kerugian untuk mengosongkan rumah Rp.}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 245.000.000,-}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 bu}{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 kti TI-2 dan TI-I serta diperkuat dengan bukti Notaris TII-I dan TII-2, bila dilihat bahwa bukti Tergugat II 3 adalah kuitansi harga pembayaran jual beli bangunan Rp.}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 315.000.000,-}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 maka terdapat kepalsuan antara bukti akta nomor 54, nomor 55 dan bukti fotokopi kuitansi pembayaran.

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 d. \tab}

Pada kesaksian Notaris Shinta Ameliawati dibawah sumpah (Lampiran bukti P12 halaman 9-10) Notaris Shinta Ameliawati dengan tegas menyatakan bahwa akta tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2002 tetapi pada jawaban Notaris Shinta Ameliawati pada gugatan perdata Notaris Shinta Ameliawati menyatakan akta Nomor 54 dan Nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad.c dan ad.d). Jelas terlihat bahwa terdapat kepalsuan cerita yang diucapkan Notaris Shinta Ameliawati di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\af1 e. \tab} Pada kesaksian Notaris Shinta Ameliawati dibawah sumpah (Lampiran bukti P12 hal 9-10) Notaris Shinta Ameliawati dengan tegas menyatakan bahwa Notaris Shinta Ameliawati telah mengenal Penggugat II selama 20 tahun, berdasarkan pengakuan tersebut tidak mungkin bila seseorang telah mengenal selama 20 tahun tidak mengetahui rumah Pengguga t

II selain itu fakta yang ada bahwa lokasi rumah Penggugat Kompensi terletak di tengah kota dan berada di kawasan elite jadi secara logika tidak mungkin ada rumah sangat sederhana di tempat tersebut tetapi pada isi akta Nomor 54 jelas tersurat bahwa rumah para Penggugat disebutkan sebagai Rumah Sangat Sederhana (RSS) padahal rumah para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah rumah mewah. Apakah boleh seorang notaris mengkonstatir kenyataan dengan menyatakan rumah mewah sebagai rumah RSS?.

par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\af1 f. \tab} Pada bukti TII-3 yang

disampaikan Tergugat II dalam Kompensi maupun Tergugat I dalam Kompensi jelas menunjukkan bahwa baik Notaris Shinta Ameliawati maupun Djohan Hijanto sama- sama mengetahui jual beli seharga Rp.315.000.000,- tetapi pada kenyataannya dalam akta Nomor 54 tan

ggal 10 Mei 2002 yang diajukan bukti oleh Tergugat I (TI-I), Tergugat II (TII-I) dan turut Tergugat II-8 didapatkan pernyataan secara tersurat bahwa rumah para Penggugat dinilai sebagai rumah RSS seharga Rp.70.000.000,- }

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Menurut Prof. GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris halaman }{\f1\insrsid14363326 \charrsid13073001 61 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

apabila para pihak memberitahukan kepada notaris harga jual beli antara kedua belah pihak akan tetapi meminta notaris untuk mencantumkan harga lebih rendah maka notaris tersebut melakukan kesa

lahan berupa "intellectuele valsheid in geschrifte" yang dimaksud dalam Pasal }{\f1 \insrsid14363326\charrsid13073001 263 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 dan }{\f1 \insrsid14363326\charrsid13073001 264 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 KUHP. }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Apalagi dalam kasus ini para Penggugat Kompensi tidak pernah tahu akta jual beli Nomor 54 yang secara yuridis dibuat pada tanggal 10 Mei 2002 tetapi menurut Nota ris Shinta Ameliawati sendiri yang membuat akta tersebut menyatakan bahwa akta tersebut ditanda tangani pada tanggal 10 April 2002. Sampai saat ini para pihak belum pernah menerima turunan akta nomor 54 dari notaris Shinta Ameliawati.

par {\listtext\pard\plain\vf1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\af1 g.\tab}}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Dalam jawabannya Ter gugat II(Notaris Shinta Ameliawati) menyatakan Notaris Shinta Ameliawati menyatakan akta akta nomor 54 dan nomor 55 tanggal 10 Mei 2002 ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad.c dan ad.d) bila kita te }{\f1\insrsid8925667 liti }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 lebih dalam pa

da bukti Tergugat I (TI-I), Tergugat II (TII-I) dan turut Tergugat II-8 terdapat kalimat "tanah hak sewa yang dikelola oleh Kotamadya Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam surat ijin Pemakaian Tanah Jangka Me }{\f1\insrsid8925667 ne }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 ngah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Nomor 185.45/ 1643P/402.4.22/ }{\f1 \insrsid8925667 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tertanggal 3 Mei 2002 seluas 162 m2 tertulis atas nama Ny. Nanik Susilowati" dengan jelas tersurat bahwa surat ijin pemakaian tanah atas nama Ny.Nanik Susilowati bar) {\f1\insrsid8925667 u} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 keluar tanggal 3 Mei 2002 tetapi dalam jawabannya Notaris Shinta Ameliawati menyatakan tanda tangan dilakukan setelah diadakan pembacaan akta tersebut oleh Notarisnya sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas didapatkan bahwa akta nomor 54 dan nomor 55 yang ditanda

angani pada tanggal 10 April 2002 adalah akta yang palsu dan jawaban Notaris Shinta Ameliawati pada tanggal 5 Nopember 2004 (Lampiran Bukti P-6 halaman 17 ad.c dan ad.d) adalah palsu/tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebab pada tanggal 10 April 2002 akta tersebut belum ditulis isinya sebab masih menunggu surat ijin pemakaian tanah dari Kotamadya yang baru keluar tanggal 3 Mei 2002. } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\f1 h. \tab} } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Karena Akta Nomor 54 dan nomor 55 dibuat pada tahun 2002 maka peraturan jabatan notaris adalah reglement op } {\f1\insrsid8925667 h} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 et notaris (Ord.van 11 Jan 1860). Maka Berdasarkan pasal 28 PJN ayat 1 yang berbunyi } {\f1\insrsid14363326\charrsid8925667

wanner een of meer der verschijnende partijen de taal waarin de akte is verleden Diet verstaan, zal huneene vertolking der akte door de notaris en indien deze daartoe Diet in staat is door eene folk, worden voorgehouden} {

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 . Yang Artinya penandatanganan dari sesuatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari yang berlainan. Di dalam Pasal I 28 PJN dinyatakan secara tegas bahwa segera setelah dibacakan akta tersebut harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap dalam arti pembacaan dari akta tersebut dilakukan sekali. } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Menurut Prof.GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris halaman 206-209 maka jelas tersurat bahwa akta nomor } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 54 } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tanggal 10 Mei 2002 yang menurut Notaris Shinta Ameliawati telah ditandatangani pada tanggal 10 April 2002 jelas kehilangan kekuatan otentiknya/akta itu tidak menjadi akta otentik. } {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

\par } \pard \qj \li993\ri0\sl360\slmult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin993\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Apakah akta otentik yang telah kehilangan sifat otentiknya bisa disebut otentik?

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\f1 2. \tab} } \pard \qj \fi-360\li360\ri0\sl360\slmult1\nowidctlpar\faauto\ls17\ri0\lin360\itap0

\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi, Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan obyek sengketa dalam gugatan Pen

gugat Kompensi/T} {\f1\insrsid8925667 e} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 rgugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi. Pada bukti Penggugat Rekonpensi/turut Tergugat Kompensi TI-1 dan bukti Tergugat II kompensi TII } {



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 -1 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 obyek sengketa di dalamnya seperti yang tercantum pada akta nomor }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 54 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 dan nomor }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 55 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tanggal 10 Mei 2002 adalah rumah sangat sederhana, padahal obyek sengketa tersebut berada di kota besar dengan bangunan berlantai }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 2 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 (dua) yang berada di lingkungan elite sehingga sangat tidak mungkin para Penggugat menjualnya pada Tergugat I dengan harga Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan nilai obyek sengketa tersebut apabila dijual sesuai harga pasar saat itu sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian terbukti dengan jelas bahwa antara Penggugat R ekonpensi }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 /} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi bekerja sama untuk memasukkan keterangan yang tidak benar }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 /} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 palsu dalam akta tersebut (lampiran bukti P-13). }{\f1\insrsid8925667\charrsid8925667

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \which\af1\dbch\af0\loch\f1 3. \tab }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Ber }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 dasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan : }{\f1\insrsid8925667

\par }{\pard \qj \li360\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin360\itap0\pararsid8925667 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \93Dalam pertimbangan hukum pokok perkara konpen si Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa bukti kartu keluarga Nomor 125619/98/00827 tertanggal 5 Juni 2002 sebagai hal yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan adalah tidak benar\94 (Lampiran Bukti P-5 halaman 36). }{\f1\insrsid8925667

\par }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Bahwa menurut pendapat para Pemohon Kasasi, Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh }{\f1\insrsid8925667 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum karena materi gugatan para Penggugat seperti yang tercantum pada Isi gugatan maupun essensi pokok perkara adalah menyatakan bahwa Akta Nomor }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 54 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tanggal 10 Mei 2002 tentang "Jual Beli Bangunan Rumah dan Pindahan Hak Sewa Tanah Persewaan Kota Surabaya" dan Nomor }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 55 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tentang "Perjanjian Pengosongan Rumah" yang dibuat oleh Notaris Shinta Ameliawati, SH pada tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 /} {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 PPAT Shinta Ameliawati (Tergugat II) adalah }{\f1\insrsid8925667 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 tidak sah dan batal demi hukum; }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 kartu keluarga adalah akta otentik sedangkan bila dilihat pada kartu keluarga jelas terlihat bahwa pada tanggal 10 Mei 2002 Ny.Nanik Susilowati melahirkan anak kembar yaitu anak keenam dan ketujuh yang diberi nama : Michael William dan Michella William (Lampiran Bukti P-7 urutan nomor 8 dan 9). Kelahiran anak keenam dan ketujuh yang bernama Michael dan Mic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hella William diperkuat dengan akta kelahiran dari kedua anak kembar tersebut (Lampiran Bukti P-8 dan P-9).)

\par \pard \qj \li540\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\faauto\rin0\lin540\itap0
\pararsid16655565 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Pasal 165 HIR menyatakan Akta Otentik }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akte tersebut.}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Kartu keluarga}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 dan Akta Kelahiran adalah Akta otentik.

\par Hal ini jelas menyatakan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan

bahwa tidak ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan para Penggugat adalah salah. Sebab akta Notaris No.54 dan No. 55 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat Notaris Shinta Ameliawati bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu keadaan dan keberadaan Penggugat I Kompensi atau Tergugat Rekonpensi (Ny.Nanik Susilowati) pada tanggal 10 Mei 2002 adalah melahirkan anak kembar di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo. Bukti-bukti yang mendukung keadaan tersebut di atas :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1. \tab}}\pard \qj \fi-426\li993\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\jclisttab\tx900\faauto\ls23\rin0\lin993\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Kartu keluarga (Lampiran Bukti P-7).){\f1\insrsid16655565

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 2. \tab}}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Akta kelahiran kedua anak kembar tersebut (Lampiran Bukti P-8 dan P-9).){\f1\insrsid16655565

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 3. \tab}}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Juga diperkuat oleh Surat Keterangan Medik yang dibuat oleh Dr. Hanny Sumampouw, Sp.OG yang menyatakan bahwa Ny.Nanik Susilowati masuk Rumah Sakit tanggal 09 Mei 2002 dan keluar Ru

mah Sakit tanggal 14 Mei 2002 dan pada tindakan perawatan Dr.Hanny Sumampouw, Sp.OG menyatakan : "dilakukan operasi Sectio Caesaria pada tanggal 10 Mei 2002, pembiusan dimulai jam 13.00, operasi dimulai jam 13.10, Bayi I lahir jam 13.18, Bayi II lahir jam 13.20. Operasi selesai jam 14.00 (Lampiran Bukti P-10).){\f1\insrsid16655565

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid16655565 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 4.\tab}}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Dan dipertegas dengan Surat Keterangan dari pihak Rumah Sakit Katolik St.Vincentius A Paulo yang ditandatangani bagian Tata Usaha yaitu Ibu Lucia B yang menyatakan bahwa Ny. Nanik Susilowati benar-

benar menderita sakit di Rumah Sakit tersebut sejak 09 Mei 2002 dan pulang tanggal 14 Mei 2002 (Lampiran Bukti P-II).

\par \pard \qj \fi-426\li426\ri0\sl360\smult1\nowidct\par\faauto\rin0\lin426\itap0
\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "Menimbang bahwa selanjutnya mempertimbangkan bukti surat P1 dan P2-2 dan P-1 dan P2-5 masing-masing tanggal 9 Agustus 2004 dan 27 April 2005".

\par \pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

"Bahwa setelah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim terhadap kedua bukti surat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut }{\f1\insrsid8925667 :}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1.

\tab}}\pard \qj \fi-425\li85\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\jclisttab\tx851\faauto\ls24\rin0

\lin851\itap0\pararsid539588 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Surat keterangan yang menyatakan Penggugat I/ Tergugat Rekonpensi Nanik Susilowati menderita sakit sejak

tanggal 9 Mei 2002 sampai dengan tanggal 14 Mei 2002 baru dibuat pada tanggal 9 Agustus 2004 jadi 2 tahun 3 bulan kemudian surat keterangan tersebut dibuat, begitu pula surat keterangan pada tanggal 27 April 2005 baru dibuat 3 tahun ;

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 2.

\tab}Bahwa kedua bukti sura

t tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bukan sebagai alat bukti dengan alasan hanya merupakan keterangan seharusnya mereka yang memberikan pernyataan memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan".

\par \pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Bahwa menurut pendapat }{\f1

\insrsid8925667 P}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 ara Pemohon Kasasi }{\f1

\insrsid14363326\charrsid13073001 , }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Keputusan

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum sebab :

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 1.

\tab}}\pard \qj \fi-465\li89\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\jclisttab\tx891\faauto\ls25\rin0

\lin891\itap0\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Berdasarkan Pasal 164 HIR menyatakan : Maka yang disebut bukti adalah bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah.

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 2.

\tab}Berdasarkan Pasal 1866 BW menyatakan alat-alat bukti terdiri a){\f1\insrsid8925667

t}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

as bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan pengakuan, sumpah. }

{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

\par {\listtext\pard\plain\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 \hich\af1\dbch\af0\loch\af1 3.

\tab}Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Surat Keterangan

Medik yang dibuat oleh Dr.Hann}{\f1\insrsid3560943 y}{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Sumampouw, SpOG dan Surat Keterangan dari RSK

St. Vincentius A Paulo hanya sebagai keterangan adalah salah dan melanggar hukum }{\f1

\insrsid14363326\charrsid13073001

sebab Surat Keterangan dari Rumah Sakit St.Vincentius A Paulo dan Surat Keterangan

Medik yang dikeluarkan oleh Dr.Hann}{\f1\insrsid8925667 y}{\f1\insrsid14363326

\charrsid13073001

Sumamouw. Sp.OG adalah medical record dari penderita Ny.Nanik Susilowati dalam hal

ini adalah Penggugat I/Tergugat Rekon}{\f1\insrsid8925667 p}{\f1\insrsid14363326

\charrsid13073001 ensi dan meru}{\f1\insrsid8925667 p}{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 akan akta otentik. }{\f1\insrsid14363326
\charrsid13073001 Dalam hal ini jelas terlihat bahwa pertimbangan majelis Hakim
melanggar hukum.

\par }{\pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Surat Keterangan Medik dari Dr.Hani Sumampouw, SpOG dan surat keterangan dari Rumah
Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo merupakan surat keterangan yang keabsahannya dan
kebenarannya telah terbukti dengan sendirinya yang didukung dengan kartu keluar
ga maupun akta kelahiran. Semua surat tersebut adalah akta otentik yang merupakan hasil
dari pegawai umum.

\par }{\pard \qj \fi-426\li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 5. "Menimbang, bahwa bukti
surat bertanda TI-2, TI }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 -6, }{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 TII }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 -1 }{\f1
\insrsid14363326\charrsid13073001 dan TII }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 -3 }
{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

dan TT II-8 adalah surat bukti tentang jual beli bangunan (rumah) dan Pemindahan Hak Sewa
Tanah Persewaan Kota Surabaya" }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 (Lampiran bukti
P-6 halaman 39).

\par }{\pard \qj \li426\ri0\sl360\smult1\nowidctlpar\faauto\rin0\lin426\itap0

\pararsid14363326 {\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

Bukti surat yang digunakan Tergugat I (TI-2) atau Penggugat Rekonpensi (Lampiran bukti
P-6 halaman 30). Tergugat II Konpensi (TII-1) (Lampiran bukti P-6 halaman 32) dan turut
Ter

gugat II (TTII-8) (Lampiran bukti P-6 halaman 33) adalah bukti Akta Jual Beli Bangunan
Rumah dan Pemindahan Hak Sewa Tanah Persewaan Kota Surabaya No.54 tanggal 10 Mei
2002 yang dibuat di hadapan Notaris Shinta Ameliawati, SH. Bukti ini adalah bukti yang
menyatakan tentang jual beli rumah tersebut. Pembahasan lebih detail dan terperinci akan
dibahas oleh para Pemohon Kasasi pada keberatan ke 5.

\par }{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 Bahwa menurut pendapat para Pemohon
Kasasi, Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan hukum
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam keputusannya adalah telah melanggar hukum
sebab }{

\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 bukti TI-6 dan TII-3. TI-6 adalah bukti nomor 6 dala}
{\f1\insrsid7477386 m}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001

daftar bukti Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi yaitu foto copy 1 set kuitansi
terdiri dari 3 lembar

r kuitansi (Lampiran bukti P-6 halaman 31) yang bila dicermati dengan seksama dan teliti
didapatkan kejanggalan pada bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu :

\par Pada bukti TI 6 ad.1 didapatkan kuitansi tentang Pembayaran harga jual beli bangunan
disertai p

emindahan hak sewa atau persil di Jalan Barata Jaya V/12 Surabaya ke atas nama Djohan
Hijanto tertanggal 10 April 2002 senilai Rp.315.000.000,- bukti tersebut sama dengan bukti
yang diajukan Tergugat II (TII-3) adalah bukti nomor 3 dala}{

\f1\insrsid7477386 m}{\f1\insrsid14363326\charrsid13073001 daftar bukti Tergu

gat II. Sedangkan pada bukti TI-6 ad.3 didapatkan bukti pembayaran "uang muka bangunan
di Jalan Barata Jaya V/12 Surabaya seharga an rupa untuk menasehati (mendamaikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553
 \charrsid3173553 2.2}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid5403673 .}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch
 \fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 \tab }{\rtch
 \fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12522210 SAKSI 2}{\rtch
 \fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 , umur }
 {\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 --}{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 tahun, agama
 Islam, pekerjaan }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 -----}{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553
 , tempat kediaman di Dusun }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 ----}{\rtch\fc1
 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 RT.}{\rtch
 \fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 --}{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 RW.}{\rtch\fc1
 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 --}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033
 \langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 Desa }{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12522210 ---- }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid3173553 Kecamatan }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0
 \langfe1033\langnp0\insrsid12522210 -----}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0
 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 Kabupaten Kuningan;}
 {\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid5403673 }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1
 \insrsid3173553\charrsid5403673

\par } \pard \trpar\qj \fi570\li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tlhyph\tx7710\wrapdefault\faauto
 \rin0\lin0\itap0\pararsid3173553 {\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid3173553

Menimbang, bahwa di persidangan dibawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\par } \pard \trpar\qj \fi-345\li345\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx360\thhyph\tx7635
 \wrapdefault\faauto\rin0\lin345\itap0\pararsid3173553 {\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0
 \langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 1.\tab Saksi }{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0 \f1\insrsid4076057 (}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid12522210 SAKSI 1}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid4076057)}{\rtch\fc1 \af1
 \ltrch\fc0

\f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 :

\par {\listtext\pard\plain\trpar \rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbh\af0\loch\fo -\tab } \pard \trpar\qj \fi-360
 \li720\ri0\sl480\smult1\widctlpar

\jclisttab\tx360\tx709\thhyph\tx7710\wrapdefault\faauto\ls11\rin0\lin720\itap0
 \pararsid3173553 {\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553
 \charrsid12796591

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12796591 \charrsid12796591

\par {\listtext\pard\plain\trpar \rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbh\af0\loch\fo -\tab }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch
 \fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591

Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon }{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1 \insrsid12796591\charrsid12796591 baik-baik}{\rtch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0 \langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 , namun }{\rtch\fc1 \af1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f1\insrsid12796591\charrsid12796591 }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0
 \langfe1033\langnp0\insrsid12796591\charrsid12796591 sejak bulan Agustus 2013}{\rtlch
 \fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
 \f1\insrsid12796591\charrsid12796591 r}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033
 \langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591
 umah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033
 \langnp0\insrsid12796591\charrsid12796591
 \par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -atab}}\pard \ltrpar\qj \fi-360
 \li720\ri0\sl480\smult1\widctlpar
 \jclisttab\tx360\tx709\thyphtx7695\wrapdefault\faauto\sl11\rin0\lin720\itap0
 \pararsid3173553 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553
 \charrsid12796591

Bahwa, penyebabnya adalah istri tidak menerima nafkah yang diberikan oleh suami padahal
 suami su}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12796591
 \charrsid12796591 dah memenuhi sesuai kemampuan;

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -atab}}\pard \ltrpar\qj \fi-360
 \li720\ri0\sl480\smult1\widctlpar
 \jclisttab\tx360\tx709\thyphtx7710\wrapdefault\faauto\sl11\rin0\lin720\itap0
 \pararsid3173553 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553
 \charrsid12796591 Bahwa, saksi}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0
 \f1\insrsid12796591\charrsid12796591 }{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033
 \langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 pernah melihat langsung ketika Pemohon d}
 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0

\f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12796591\charrsid12796591 an Termohon sedang
 bertengkar;

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -atab}}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch
 \fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 Bahwa, {
 \rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\insrsid12796591\charrsid12796591 telah}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch
 \fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 }{\rtlch\fcs1 \af1
 \ltrch\fcs0

\f1\cf17\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591 5 bulan }{\rtlch\fcs1
 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591

lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak
 saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;}{\rtlch\fcs1 \af1
 \ltrch\fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12796591\charrsid12796591

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \lang0\langfe1033\langnp0
 \insrsid3173553\charrsid12796591 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -atab}}{\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch
 \fcs0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid12796591

Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali serta tidak usah
 bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi-405\li405\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx360\thyphtx7710
 \wrapdefault\faauto\rin0\lin405\itap0\pararsid3173553 {\rtlch\fcs1 \af1 \ltrch\fcs0 \f1\lang0
 \langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 2.\tab Saksi }{\rtlch\fcs1 \af1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\ltrch\fes0 \f1\insrsid4076057 () {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid12522210 SAKSI 2} {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\insrsid4076057)} {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0

\f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 :

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab} }\pard \ltrpar\qj \fi-360

\li720\ri0\sl480\smult1\widct\par

\jclisttab\tx360\tx720\tlhyph\tx7710\wrapdefault\faauto\ls11\rin0\lin720\itap0

\pararsid3173553 {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553 \charrsid3173553 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab} Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dika} {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0

\f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid12796591 runiai keturunan 2 orang anak;} {\rtlch\fes1

\af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab}

Bahwa, penyebabnya adalah istri tidak menerima nafkah yang diberikan oleh suami padahal suami sudah memenuhi sesuai kemampuan;} {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1

\insrsid12796591 } {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0

\f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab} Bahwa, Pemohon dan

Termohon sudah pisah tempat tinggal } {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\insrsid12796591

5 bulan } {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553

\charrsid3173553 dan Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dengan keluarganya masing-masing;

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab} Bahwa, Pemohon dan

Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;

\par {\listtext\pard\plain\ltrpar \rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553 \hich\af0\dbch\af0\loch\af0 -\tab} }\pard \ltrpar\qj \fi-360

\li720\ri0\sl480\smult1\widct\par

\jclisttab\tx360\tx720\tlhyph\tx7695\wrapdefault\faauto\ls11\rin0\lin720\itap0

\pararsid3173553 {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553

\charrsid3173553 Bahwa, s

aksi dan pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak pernah berhasil;

\par }\pard \ltrpar\qj \fi570\li0\ri0\sl480\smult1\widct\par\tlhyph\tx7710\wrapdefault\faauto

\rin0\lin0\itap0\pararsid3173553 {\rtlch\fes1 \af1 \ltrch\fes0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0

\insrsid3173553\charrsid3173553

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

\par Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi

SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang bahwa bukti

(P.1) dan (P.2)

adalah potokopi kartu tanda penduduk a.n. Pe mohon

, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut, ternyata benar Pe mohon

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,

oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P) adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 13 Juli 1996, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon dan sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon mas

ih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (Barquote da dukhul) dan telah di

karuniai 2 orang anak bernama (1). ANAK PERTAMA

, umur 16 tahun, ANAK KEDUA

, umur 8 tahun;

lagi kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab ketidakrukunan adalah karena istri tidak menerima nafkah yang diberikan oleh suami padahal suami sudah memenuhi sesuai kemampuan;

5 bulan telah pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal bersama keluarganya dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan alasan tidak ada lagi keharapan untuk dipertahankan lagi karena istri tidak menerima nafkah yang diberikan oleh suami padahal suami sudah memenuhi sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 5 bulan dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (marriage breakdown), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Onheal baartweespalt);

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di luar persidangan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan keinginannya untuk tetap bercerai;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertah

ankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa berda sarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ke

an dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan agar rukun kembali (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon suda

h pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan yang sah untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimba

ngan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka cerai talaknya dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Meni

mbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba

quote da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj

i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Pemohon} {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12725699 ;}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid3173553\charrsid12725699

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi570\li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0 \pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553 \charrsid3173553 Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara\quote yang berhubungan dengan perkara ini;}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid3173553

\par }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid7079096\charrsid7079096

\par }}\pard \ltrpar\qc \li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0 \pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \ab\af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553 MENGADILI}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi-360\li360\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx360\wrapdefault\faauto\rin0 \lin360\itap0\pararsid3173553 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553 1.\tab

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;

\par 2.\tab Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi-360\li360\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx360\wrapdefault\faauto\rin0 \lin360\itap0\pararsid12522210 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553 3.\tab Memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu rajrquote i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kuningan;

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi-360\li360\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx360\wrapdefault\faauto\rin0 \lin360\itap0\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553 4.\tab

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi570\li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tlhyph\tx7695\wrapdefault\faauto \rin0\lin0\itap0\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0 \insrsid3173553\charrsid3173553

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan, pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal } {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12725699 17 Muharam 1436.}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 Hijriyah,}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12725699 }{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553

oleh Drs. SUBHAN FAUZI, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. EPOY ROSMANA, S.H. dan H. M. ZAENI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksa perkara ini dengan penetapan Nomor} {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid12725699 }{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\lang0\langfe1033\langnp0\insrsid3173553\charrsid3173553 1796/Pdt.G/2014/PA.Kng.

tanggal 15 September 2014, dibantu oleh TATANG SUKARSA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pe} {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par TATANG SUKARSA, S.H.

\par }}\pard \ltrpar\qj \li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\wrapdefault\faauto\vrin0\lin0\itap0

\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0

\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 Perincian Biaya :

\par }}\pard \ltrpar\qj \fi-420\li420\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx705\tx6090\tx6240\tqr

\tx7695\wrapdefault\faauto\vrin0\lin420\itap0\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0

\f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359

1. \tab Biaya Pendaftaran\tab \tab Rp. \tab 40.000,-

\par 2. \tab Biaya Proses\tab \tab Rp. \tab 50.000,-

\par 3.\tab Panggilan Pemohon }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033\langfe1057

\langfenp1057\insrsid14485082 2}}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057

\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 X \tab \tab Rp. \tab }}{

\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033\langfe1057\langfenp1057\insrsid14485082 170}

{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699

\charrsid16736359 .000,-

\par }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057

\insrsid14485082 4. \tab Panggilan Termohon }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033

\langfe1057\langfenp1057\insrsid14485082 4}}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0

\f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 X \tab

\tab Rp.\tab }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033\langfe1057\langfenp1057

\insrsid14485082 340}}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0

\f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 .000,-

\par 5. \tab Redaksi\tab \tab Rp. \tab 5.000,-

\par }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\ul\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057

\insrsid12725699\charrsid16736359 6. \tab Materai\tab \tab Rp. \tab 6.000,-

\par }}\pard \ltrpar\qj \li285\ri0\sl480\smult1\widctlpar\tx705\tx6210\tx6375\tqr\tx7650

\wrapdefault\faauto\vrin0\lin285\itap0\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1

\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 Jumlah

\tab Rp. \tab }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033\langfe1057\langfenp1057

\insrsid12725699 601}}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0

\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 .000,-

\par }}\pard \ltrpar\qj \li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\qqr\tx7635\tqr\tx8550\wrapdefault

\faauto\vrin0\lin0\itap0\pararsid12725699 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057

\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 \tab (}}{\rtlch\fc1

\af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang1033\langfe1057\langfenp1057\insrsid12725699 enam}}{\rtlch

\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699

\charrsid16736359 ratus }}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0

\f1\cf1\lang1033\langfe1057\langfenp1057\insrsid12725699 satu}}{\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0

\f1\cf1\lang0\langfe1057\langnp0\langfenp1057\insrsid12725699\charrsid16736359 ribu

rupiah)

\par }}\pard \ltrpar\qj \li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\wrapdefault\faauto\vrin0\lin0\itap0

\pararsid3173553 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid3173553\charrsid12725699

\par }}\pard \ltrpar\qj \li0\ri0\sl480\smult1\widctlpar\wrapdefault\faauto\adjustright\vrin0\lin0

\itap0\pararsid3173553 {\rtlch\fc1 \af1 \ltrch\fc0 \f1\insrsid14644070\charrsid3173553

\par }}{*}\themedata

504b030414000600080000002100828abc13fa0000001c020000130000005b436f6e74656e74

5f54797065735d2e786d6cac91cb6ac3301045f785fe83d0b6d8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72ba28a5d8cea249777d2cd20f18e4b12d6a8f843409c9df77ecb850ba082d74231062ce997b5
 5ae8fe3a00e1893f354e9555e6885647de3a8abf4fbee29bbd7
 2a3150038327acf409935ed7d757e5ee14302999a654e99e393c18936c8f23a4dc072479697d1
 c81e51a3b13c07e4087e6b628ee8cf5c4489cf1c4d075f92a0b
 44d7a07a83c82f308ac7b0a0f0fbf90c2480980b58abc733615aa2d210c2e02cb04430076a7ee8
 33dfb6ce62e3ed7e14693e8317d8cd0433bf5c60f53fea2fe7
 065bd80facb647e9e25c7fc421fd2ddb526b2e9373fed4bb902e182e97b7b461e6bfad3f010000
 ffff0300504b030414000600080000002100a5d6a7e7c00000
 00360100000b0000005f72656c732f2e72656c73848fcf6ac3300c87ef85bd83d17d51d2c3182
 5762fa590432fa37d00e1287f68221bdb1bebdb4fc7060abb08
 84a4eff7a93dfeae8bf9e194e720169aaa06c3e2433fcb68e1763dbf7f82c985a4a725085b78708
 6a37bdbb55fbc50d1a33ccd311ba548b63095120f88d94fbc
 52ae4264d1c910d24a45db3462247fa791715fd71f989e19e0364cd3f51652d73760ae8fa8c9ff
 b3c330cc9e4fe17faf2ce545046e37944c69e462a1a82fe353
 bd90a865aad41ed0b5b8f9d6fd010000ffff0300504b0304140006000800000021006b7996168
 30000008a0000001c0000007468656d652f7468656d652f7468
 656d654d616e616765722e786d6c0ccc4d0ac3201040e17da17790d93763bb284562b2cbaebb
 f600439c1a41c7a0d29fdbd7e5e38337cedf14d59b4b0d592c9c
 070d8a65cd2e88b7f07c2ca71ba8da481cc52c6ce1c715e6e97818c9b48d13df49c873517d23d
 59085adb5dd20d6b52bd521ef2cdd5eb9246a3d8b4757e8d3f7
 29e245eb2b260a0238fd010000ffff0300504b03041400060008000000210096b5ade29606000
 0501b0000160000007468656d652f7468656d652f7468656d65
 312e786d6cec594f6fdb3614bf0fd87720746f6327761a07758ad8b19b2d4d1bc46e871e69899
 6d850a240d2497d1bdae38001c3ba618715d86d87615b8116d8
 a5fb34d93a6c1dd0afb0475292c5585e9236d88aad3e2412f9e3fbff1e1fa9abd7eec70c1d12212
 94fda5efd72cd4324f1794093b0eddd1ef62fad79482a9c04
 98f184b4bd2991deb58df7dfbb8ad755446282607d22d771db8b944ad79796a40fc3585ee6294
 9606ecc458c15bc8a702910f808e8c66c69b9565b5d8a314d3c
 94e018c8de1a8fa94fd05093f43672e23d06af89927ac06762a049136785c10607758d9053d96
 5021d62d6f6804fc08f86e4bef210c352c144dbab999fb7b471
 7509af678b985ab0b6b4aef7ed9ba6c4170b06c788a705430adf71bad2b5b057d03606a1ed7e
 bf5babd7a41cf00b0ef83a6569632cd467faddec9699640f671
 9e76b7d6ac355c7c89feca9cccad4ea7d36c65b258a206641f1b73f8b5da6a6373d9c11b90c537
 e7f08dce66b7bbeae00dc8e257e7f0fd2badd5868b37a088d1
 e4600ead1ddaef67d40bc898b3ed4af81ac0d76a197c86826828a24bb318f3442d8ab518dfe3a2
 0f000d6458d104a9694ac6d88728eee2782428d60cf03ac1a5
 193be4cbb921cd0b495fd054b5bd0f530c1931a3f7eaf9f7af9e3f45c70f9e1d3ff8e9f8e1c3e307
 3f5a42ceaa6d9c84e552fbffdeccfc71fa33f9e7ef3f2d1
 17d57859c6fffac327bffcfc793510d26726ce8b2f9ffcf6ecc98baf3efdfdbb4715f04d814765f89
 0c644a29be408edf3181433567125272371be15c308d3f2
 8acd249438c19a4b05fd9e8a1cf4cd296699771c393ac4b5e01d01e5a30a787d72cf117810898
 9a2159c77a2d801ee72ce3a5c545a6147f32a99793849c26ae6
 6252c6ed637c58c5bb8b13c7bfbfd490a75330f4b47f16e441c31f7184e140e494214d273fc8090
 0aedee52ead87597fa824b3e56e82e451d4c2b4d32a423279a
 668bb6690c7e9956e90cfe766cb37b077538abd27a8b1cba48c80acc2a841f12e698f13a9e281c
 57911ce298950d7e03aba84ac8c154f8655c4f2af074481847
 bd804859b5e696007d4b4edfc150b12addbecba6b18b148a1e54d1bc81392f23b7f84137c2715
 a851dd0242a633f900710a218ed715505dfe56e86e877f0034e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{*\colorschememapping
3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e302220656e636f64696e673d225554462d38222073
74616e64616c6f6e653d22796573223f3e0d0a3c613a636c724d
617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6
174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d6169
6e22206267313d226c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d2
2646b32220616363656e74313d22616363656e74312220616363
656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656
e74343d22616363656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74
363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f
6c486c696e6b222f3e}
{*\latentstyles\sdstimax267\lsdlockeddef0\lsdsemihiddendef1\lsdunhideuseddef1
\lsdqformatdef0\lsdprioritydef99{\lsdlockedexcept \lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdqformat1 \lsdpriority0 \lsdlocked0 Normal;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 1;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 2;
\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 3;
\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 4;\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0
heading 5;\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 6;\lsdqformat1 \lsdpriority9
\lsdlocked0 heading 7;\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 8;
\lsdqformat1 \lsdpriority9 \lsdlocked0 heading 9;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 1;
\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 2;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 3;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc
4;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 5;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 6;
\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 7;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc 8;\lsdpriority39 \lsdlocked0 toc
9;\lsdqformat1 \lsdpriority35 \lsdlocked0 caption;\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdqformat1 \lsdpriority10 \lsdlocked0 Title;
\lsdpriority1 \lsdlocked0 Default Paragraph Font;\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdqformat1 \lsdpriority11 \lsdlocked0 Subtitle;\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdqformat1 \lsdpriority22 \lsdlocked0 Strong;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdqformat1 \lsdpriority20 \lsdlocked0 Emphasis;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority59 \lsdlocked0 Table Grid;\lsdunhideused0
\lsdlocked0 Placeholder Text;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdqformat1 \lsdpriority1 \lsdlocked0 No Spacing;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority60 \lsdlocked0 Light Shading;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority61 \lsdlocked0 Light List;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority62 \lsdlocked0 Light Grid;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority63 \lsdlocked0 Medium Shading 1;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority64 \lsdlocked0 Medium Shading 2;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority65 \lsdlocked0 Medium List 1;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority66 \lsdlocked0 Medium List 2;\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdpriority67 \lsdlocked0 Medium Grid 1;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority68 \lsdlocked0 Medium Grid 2;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority69 \lsdlocked0 Medium Grid 3;\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0
\lsdpriority70 \lsdlocked0 Dark List;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority71 \lsdlocked0 Colorful Shading;
\lsdsemihidden0 \lsdunhideused0 \lsdpriority72 \lsdlocked0 Colorful List;\lsdsemihidden0
\lsdunhideused0 \lsdpriority73 \lsdlocked0 Colorful Grid;
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 1;
 \sdunhideused0 \sdlocked0 Revision;\sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1
 \sdpriority34 \sdlocked0 List Paragraph;\sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1
 \sdpriority29 \sdlocked0 Quote;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority30 \sdlocked0 Intense Quote;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 1;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 2;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 3;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 4;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 5;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority60 \sdlocked0 Light Shading Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority61 \sdlocked0 Light List Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority62 \sdlocked0 Light Grid Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority63 \sdlocked0 Medium Shading 1 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority64 \sdlocked0 Medium Shading 2 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority65 \sdlocked0 Medium List 1 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority66 \sdlocked0 Medium List 2 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority67 \sdlocked0 Medium Grid 1 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority68 \sdlocked0 Medium Grid 2 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority69 \sdlocked0 Medium Grid 3 Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority70 \sdlocked0 Dark List Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority71 \sdlocked0 Colorful Shading Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority72 \sdlocked0 Colorful List Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdpriority73 \sdlocked0 Colorful Grid Accent 6;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority19 \sdlocked0 Subtle Emphasis;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority21 \sdlocked0 Intense Emphasis;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority31 \sdlocked0 Subtle Reference;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority32 \sdlocked0 Intense Reference;
 \sdsemihidden0 \sdunhideused0 \sdqformat1 \sdpriority33 \sdlocked0 Book Title;
 \sdpriority37 \sdlocked0 Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

